

**FENOMENA KORUPSI INDONESIA: PERPEKTIF TEORITIK
STRUKTURAL FUNGSIONAL, ANALISA KRITIS DALAM
KERANGKA DINAMIKA KONFLIK SOSIAL POLITIK DAN
DIALEKTIKA ANTARA *STATE*, *POLITICAL SOCIETY* DAN
CIVIL SOCIETY
*INDONESIAN CORRUPTION PHENOMENON: FUNCTIONAL
STRUCTURAL THEORETIC PERSPECTIVES, CRITICAL
ANALYSIS IN THE FRAMEWORK OF POLITICAL AND
DIALECTIC CONFLICT DYNAMICS BETWEEN STATE,
POLITICAL SOCIETY AND CIVIL SOCIETY***

Adam Amin Bahar

Program Studi Ilmu Sosial, FISIP, Universitas Airlangga

Email : adamaminbahar@yahoo.co.id

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is social-economic phenomenon. It is like a common or ordinary phenomenon in society, the rampant violations of power and law abuse to carry out corrupt activities become a social reality in the lives of the Indonesian people. There are many examples of cases that occur at this time, such as the example of an e-KTP case conducted by Defendant Setyo Novanto who is also the former chairman of the Indonesian House of Representatives at the Indonesian government council. In addition there are many more corruption activities taking place in Indonesia as a government state. Political social groups and social groups of the population in the community, whether it includes criminal acts (criminal and / or civil) or not included as a fraud or legal error. This article uses literature study and with a Qualitative approach. With the study and analysis of these phenomena theoretically in particular from the Functional Structural social theory perspective, the Neo Functional theory, the Neo Marxian Theory to be analyzed with a critical theoretical perspective with the Frankfurt School. The results of this scientific article are a Theoretical compilation of Functional Structural Theory, Neo Functional, Neo Marxian Theory and Critical Theory (Frankfurt School) about the Reality of Indonesian Corruption Phenomena in the framework of the dynamics of social-political and dialectical conflicts between State, Political Society and Civil Society.

Keywords: *Indonesian Corruption, Socio-Political Group, Functional Structural*

ABSTRAK

Fenomena korupsi di Indonesia saat ini seperti menjadi fenomena yang lazim atau biasa di masyarakat, maraknya pelanggaran penyelewengan kekuasaan dan hukum untuk menjalankan aktivitas korupsi menjadi sebuah realitas sosial di kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Banyak contoh kasus yang terjadi saat ini,

seperti contoh kasus e-KTP yang dilakukan oleh terdakwa Setyo Novanto yang juga selaku mantan ketua DPR RI di dewan pemerintahan Indonesia. Selain itu masih banyak lagi aktivitas-aktivitas korupsi terjadi di Indonesia sebagai negara pemerintahan. Kelompok sosial Politik dan kelompok sosial penduduk di masyarakat, baik itu sudah termasuk tindakan kriminal (pidana dan/atau perdata) maupun tidak termasuk sebagai penyelewengan atau kesalahan secara hukum. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka dan dengan pendekatan Kualitatif. Dengan kajian dan analisa fenomena tersebut secara teoritik khususnya dalam perspektif teori sosial Struktural Fungsional, teori Neo Fungsional, Teori Neo Marxian hingga dianalisa dengan perspektif teori kritis dengan mahzab *Frankfurt School*. Hasil dari artikel ilmiah ini adalah sebuah kompilasi Teoritik Perpektif Teori Struktural Fungsional, Neo Fungsional, Teori Neo Marxian dan Teori Kritis (Frankfurt School) tentang Realitas Fenomena Korupsi Indonesia dalam kerangka dinamika konflik sosial politik dan dialektika antara *State, Political Society* dan *Civil Society*.

Kata Kunci: Fenomena Korupsi Indonesia, Kelompok Sosial Politik, Struktural Fungsional

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perbincangan lama dan diperbincangkan kembali secara “canggih” di tahun 1990an (William, 1999, p. 503; Heidenheimer & Johnston, 2002). Dalam era tersebut, korupsi erat dikaitkan dengan pemikiran Weber tentang otoritas legal rasional dan teori tindakan rasional (Gephart, 2015, p. 124). Melalui sudut pandang tersebut, korupsi berubah menjadi fenomena positif yang dikonseptualisasi dan diterapkan secara universal tanpa mempertimbangkan konteks dimana konsep itu ditempatkan (Gephart, 2015). Paradigma ini utamanya dianut dan gencar dipromosikan oleh lembaga-lembaga seperti World Bank, IMF, Transparency International (TI). (..). Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan privat dan merupakan hasil dari monopoli serta diskresi yang tidak diikuti oleh akuntabilitas di bidang pemerintahan.

Banyak ilmuwan menilai bahwa perbincangan korupsi di era itu erat hubungannya dengan agenda

neoliberal (Hadiz, 2006; Bedirhanoglu, 2007; Gephart, 2015). Di satu sisi, korupsi –termasuk suap– dinilai sebagai penghambat dalam terciptanya mekanisme pasar bebas sehingga korupsi harus dihilangkan salah satunya melalui perbaikan institusi yang menjamin terciptanya ‘good governance’ (Hadiz, 2006, p. 83). Sedangkan di sisi lain, korupsi dinilai sebagai salah satu instrumen penting neoliberal dalam mengurangi peran pemerintah dan meningkatkan peran swasta (Gephart, 2015, p. 124). Dalam pandangan yang lebih ekstrim korupsi berada dalam dua titik tersebut (.). Artinya bahwa neoliberalisme memainkan korupsi sebagai instrumen mewujudkan kepentingannya. Berbagai indikator yang bersifat universal dalam meneliti korupsi dinilai sebagai salah satu langkah dalam permainan tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini bermaksud memperbincangkan pengaruh neoliberalisme dalam gerakan anti korupsi di Indonesia.

Hal ini menarik dikaji mengingat terdapat persilangan

antara berkembangnya perhatian korupsi di dunia dan perhatian korupsi di Indonesia. Perhatian korupsi di Indonesia memuncak di tahun 1990-an bersamaan dengan berkembangnya gerakan-gerakan melawan korupsi di dunia yang dipromosikan oleh lembaga-lembaga dunia seperti World Bank dan IMF. Korupsi dinilai sebagai penghambat pembangunan dan menyebabkan krisis ekonomi tahun 1997 di Asia termasuk Indonesia. Puncaknya di tahun 1998 isu korupsi mampu menjatuhkan rezim Orde Baru yang berkuasa selama tiga puluh dua tahun di Indonesia (Schutte, 2009). Setelah orde baru berakhir, kebijakan dan program pemberantasan korupsi terus mengalami peningkatan.

Di tahun 2010, lembaga pemberantasan korupsi menjadi sangat populer di masyarakat. Kepopuleran lembaga-lembaga ini ditunjukkan dengan jumlah palaku korupsi yang diungkap. Namun, yang menarik diperhatikan ialah sejak maraknya gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia jumlah pelaku korupsi diungkap semakin meningkat. Artinya bahwa masalah korupsi tidak mengalami penurunan bahkan dinilai meningkat. Pertanyaannya ialah, apakah neoliberal ada di balik persoalan tersebut? Tulisan ini mengasumsikan bahwa neoliberal memainkan peran penting dalam isu korupsi di Indonesia sejak era 1990an sampai dengan saat ini.

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah melihat kemunculan neolib di Indonesia. Neolib dalam proyek anti korupsi. Neoliberalisme dan citra lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Hegemoni neoliberal dalam diskursus korupsi di Indonesia. Discourse analisis menguji konstruksi dan fungsi historis dari suatu discourse tertentu. Dalam kasus

korupsi, berarti bahwa daripada melihat korupsi sebagai given object of analysis kajian ini berfokus pada proses objektifikasi korupsi. Artinya lebih fokus pada discourse korupsi dari pada fokus pada mengapa dan bagaimana korupsi terjadi.

METODE PENELITIAN

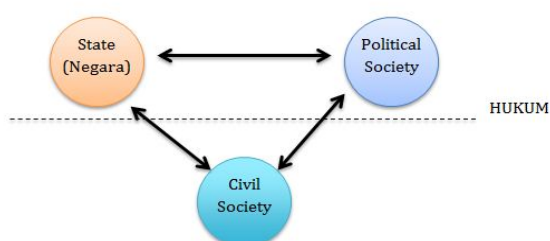
Artikel ini menggunakan pendekatan Studi Kualitatif dengan metode Analisa Wacana, dan dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Dengan kajian dan analisa fenomena tersebut secara teoritik khususnya dalam perspektif teori sosial Struktural Fungsional, teori Neo Fungsional, Teori Neo Marxian hingga dianalisa dengan perspektif teori kritis dengan mazhab *Frankfurt School*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktural Fungsional Fenomena Korupsi di Indonesia

Melihat fenomena realitas korupsi di Indonesia saat ini tidak akan terlepas dari dialektika sosial antara Negara, *Political Society* dan *Civil Society* yang diantara ketiganya itu saling berhubungan erat dan berdialektika. Menarik untuk dianalisa lebih dalam yaitu adanya hukum yang menjadi jembatan penghubung antara Negara atau pemerintahan dan Kelompok Politik dengan Masyarakat Sosial. Peraturan dan Undang-Undang yang menjadi aturan Negara harus dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat sipil, peraturan dan undang-undang itu sendiri dirancang dan ditetapkan oleh elit politik yang menduduki atau menjabat sebagai dewan pemeritahan (DPR) sehingga seringkali kebijakan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan lebih berpihak kepada kelompok politik itu sendiri. Disini terlihat dengan jelas bagaiman

struktur pemerintahan dan fungsi dari dewan itu sendiri menjadi gamang bahkan tidak jelas arah kebijaksananya, yang akhirnya menjadi praktik-praktik korupsi.



Gambar 1. Dialektika Fungsi Sosial structural Parson (Ritzer, 2011)

diawali dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua system tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fungsi yang sedang dibicarakan disini, fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan system. Menurut parson ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua system social, meliputi adaptasi (A), pencapaian tujuan atau goal attainment (G), integrasi (I), dan Latensi (L). empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua system agar tetap bertahan (survive), penjelasannya sebagai berikut:

- **Adaptation:** fungsi yang amat penting disini system harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan system harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.
- **Goal attainment;** pencapaian tujuan sangat

penting, dimana system harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

- **Integration:** artinya sebuah system harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).
- **Latency:** laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah system harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan cultural .

Analisa Neo Fungsional

Teori struktural fungsional Talcott Parson terus dikembangkan pada era modern saat ini, terutama pada perkembangan ekonomi di kawasan eropa. Neo-fungsionalisme adalah *grand theory* "teori besar" pertama yang menjelaskan fenomena integrasi di kawasan Eropa. (Holmwood, 2005) Pemikir terkemuka sekaligus pelopor dari faham ini adalah Ernst Haas. Neo-fungsionalisme berkembang pada pertengahan tahun 1950 untuk melengkapi kekurangan pada teori fungsionalisme klasik yang digagas oleh David Mitrany. Tujuan dari teori neo-fungsionalisme untuk menjelaskan dinamika terintegrasinya kawasan Eropa dan memilah serta menstruktur informasi yang relevan untuk mengembangkan pemahaman juga untuk memprediksi integrasi yang akan terjadi pada masa depan. Neo-fungsionalisme menekankan pada peran aktor non-negara sebagai yang utama dalam konstelasi politik, akan tetapi negara anggota pada kelompok regional tetap memiliki peran penting dalam proses tersebut.

Perbedaan antar fungsionalisme dan neo-fungsionalisme terlihat dari perbedaan fokus keduanya terhadap kepentingan dan kebutuhan bersama.(Strøby Jensen, 2013) Fungsionalisme lebih fokus kepada beberapa aktor yang tidak mengikat secara eksklusif terhadap *state actors*. Tujuannya pun lebih menjurus kepada pendeskripsian terhadap perdamaian dengan membangun struktur-struktur yang melayani kebutuhan aktor politik, bisa dikatakan juga fungsionalisme lebih mengidentifikasi masalah-masalah yang harus diselesaikan untuk mencapai perdamaian dan juga mengatur institusi yang akan memenuhi kebutuhan fungsional ini. Dalam fungsionalis, negara memiliki kapasitas berkuasa dalam sebuah perjanjian dan persetujuan.

Analisa Kritis Neo Marxian pada Fenomena Korupsi di Indonesia

Permasalahan ekonomi di masyarakat bangsa Indonesia menjadi salah satu faktor utama tumbuh kembang dari fenomena realitas korupsi di Negara ini. Dalam pemikiran - pemikirannya Marx menganggap bahwa sistem ekonomilah yang sangat penting dan menegaskan sitem ekonomi menentukan semua sector masyarakat. Sektor politik, agama dan sebagainya tak bisa terlepas dari sistem ekonomi, semuanya dipengaruhi oleh sektor ekonomi.(Levine, 2012) Para pemikir Marxis yang meyakini determinisme ekonomi, kapitalisme akan mengalami kehancuran pada saatnya nanti. Penyebab kehancuran kapitalisme adalah sistem kapitalisme itu sendiri. Maka dari itu determinisme ekonomi diharapkan mampu menemukan proses kerja itu. dan tak terelakkan

pula bahwa mereka bertujuan merebut kekuasaan politik dan menggulingkan kekuasaan kapitalis.(Kellner, 2002).

Struktur ekonomi kapitalisme yang menentukan cara berpikir dan bertindak individu menjadi elemen penting dalam teori mereka. Namun penafsiran ini banyak menimbulkan pertanyaan karena tidak konsisten dengan pemikiran Marx. Mengapa individu harus bertindak jika sistem kapitalis akan remuk karena kontradiksi structural di dalam dirinya sendiri? Determinasi ekononomi Marxisme Hegelian telah banyak menuai kritik dan kecaman, determinisme ekonomi perannya memudar dan sejumlah teoritis beralih untuk mengembangkan teori Marxian yang lainnya. Sebagian dari mereka memilih kembali ke akar Hegelian dari teori Marx dalam meneliti orientasi subyektif untuk melengkapi kekuatan analisis Marxis yang lebih menekankan pada pada tingkat obyektif material. Sejumlah pemikir seperti Georg Lukacs dan Antonio Gramsci menjadi penganut aliran kritis dari neo Marxian Hegel. Teori kritis adalah produk sekelompok neo-Marxis Jerman yang tak puas dengan keadaan teori Marxian, terutama tentang determinisme ekonomi.

Tabel 1. Tabel Pemikir Kritis dan Gagasannya

| Pemikir Kritis | Gagasan dan Ide |
|-----------------------|---|
| George Lukacs; | Gagasan - gagasan yakni tentang Reifikasi dan Kesadaran Kelas dan Kesadaran Palsu yang telah memperluas dan mengembangkan teori ekonomi Marxis tentang reifikasi dengan menyatakan bahwa komoditi yang berbentuk barang dan |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| | <p>berkembang menjadi obyek menjadi basis hubungan antar individu.(Naod & Ritzer, 2001) Dalam masyarakat kapitalis, interaksi manusia dengan alam yang menghasilkan komoditi Tetapi tanpa disadari manusia tak mampu melihat fakta bahwa sebenarnya merekalah yang menghasilkan komoditi dan memberikan nilai. Nilai justru mereka pahami sebagai produk pasar, terlepas dari aktor. Perbedaan antara Marx dengan Lukacs terkait komoditi, jika Marx terbatas penerapannya pada lembaga ekonomi saja. Sedangkan konsep Lukacs tentang reifikasi diterapkan terhadap seluruh masyarakat, Negara, hukum dan sector ekonomi. Konsep ini dapat diterapkan secara dinamis dalam semua sector masyarakat kapitalis. Ini menjadi faktor penting dalam berkembangnya fenomena korupsi di Indonesia, dengan adanya kelas-kelas elit politik, pemegang kekuasaan (pemerintahan) yang dapat menekan dan merubah sistem sosial di masyarakat</p> | | <p>paksaan yang digunakan oleh kekuasaan legislative (<i>State</i>: DPR dan MPR) atau eksekutif yang diwujudkan melalui intervensi kebijakan. Ia menekankan pada hegemoni dan kepemimpinan cultural (<i>Political Society</i>). (Bates, 1975) Menurutnya revolusi masih belum cukup untuk mengendalikan sistem ekonomi dan pemerintahan, masih perlu mendapatkan kepemimpinan cultural. Gramsci mempunyai peran penting dalam transisi dari determinisme ekonomi menuju posisi Marxian yang lebih modern. Ia bersikap kritis terhadap pandangan marxis yang deterministis, fatalistis, dan mekanistis. Ia mengakui ada sejumlah keteraturan sejarah, tapi dia menolak pandangan bahwa sejarah berlaku secara otomatis dan tidak terhindarkan. Jadi manusia harus berbuat aktif dalam menentukan sejarahnya. Gramsci mengakui pentingnya faktor struktural, khususnya ekonomi, dia tidak percaya bahwa faktor-faktor struktural menggiring massa untuk membangkang.</p> |
| <p>Antonio Gramsci;</p> | <p>Gramsci hadir dengan konsep hegemoni, sebagai kepemimpinan <i>cultural</i> yang dilaksanakan oleh kelas penguasa. Ia membedakan hegemoni dari penggunaan</p> | <p>KESIMPULAN</p> <p>Hasil dari studi pustaka dan analisa fenomena korupsi di Indonesia dengan melihat dari perspektif teori sosial Struktural</p> | |

Fungsional, adanya atau munculnya neoliberal atau liberalis dalam format baru dan modern di Indonesia. Analisa secara mendalam dan detail menggambarkan dalam fenomena korupsi mega proyek e-KTP dalam perspektif Teoritik Struktural Fungsional hingga Analisa Kritis pada kerangka dinamika konflik sosial politik dan dialektika antara *State*, *Political Society* dan *Civil Society*. Manfaat ilmiah, Teoritis dan praktis adalah kajian-kajian dan analisa kritis dari mazhab Frankfurt dapat terus dikaji dan dikembangkan untuk menganalisa dan mengkaji fenomena-fenomena hingga permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Pengembangan dari artikel ini adalah sebuah riset dengan analisa format liberalis dalam proyek anti korupsi. Neoliberalisme dan citra lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Hegemoni neoliberal dalam diskursus korupsi di Indonesia. *Discourse* analisis menguji konstruksi dan fungsi historis dari suatu *discourse* tertentu. Dalam kasus korupsi seperti e-KTP, wacana atau *discourse* korupsi menjadi fokus utama dalam fenomena pada mengapa dan bagaimana korupsi terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bates, T. R. (1975). Gramsci and the Theory of Hegemony. *Journal of the History of Ideas*, 36(2), 351. <https://doi.org/10.2307/2708933>
- Bedirhanoglu, P. (2007). The Neoliberal Discourse on Corruption as a Means of Consent Building: Reflections from Post-Crisis Turkey. *Third World Quarterly*, 28 (7), 1239-1254.
- Garnham, N. (2007). Habermas and the public sphere. *Global Media and Communication*, 3(2), 201-214. <https://doi.org/10.1177/1742766507078417>
- Gephart, M. (2015). Contested meaning in the anti-corruption Discourse: International and Local Narrative in the Case of Paraguay. *Critical Policy Studies*, 9 (2), 119-138.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Contributions To a Discourse Theory of Law and Democracy. <https://doi.org/10.2307/2941077>
- Hadiz, V. (2006). Corruption and Neoliberal Reform: Market and Predatory Power in Indonesia and Southeast Asia. In R. Robinson, *The Neo-Liberal Revolution: Forging the Market State*. New York: Palgrave Macmillan.
- Heidenheimer, A., & Johnston, M. (2002). *Political Theory: Concepts and Contexts*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Holmwood, J. (2005). Functionalism and its critics. *Modern Social Theory: An Introduction*, II, 1-8. Retrieved from <http://www.eolss.net/Eolss-sampleAllChapter.aspx>
- Huntington. (2002). Modernization and Corruption. In A. Heidenheimer, & M. Johnston, *Political Corruption: Concepts and Contexts*. Ne Jersey: Transaction Publisher.
- Juwono, V. (2016). *Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and Anti-Corruption Initiatives in Indonesia 1945-2014*. London School of Economy and Political Science.
- Kellner, D. (2002). Theorizing Globalization. *Sociological Theory*, 20(3), 285-305. <https://doi.org/10.1111/0735-2751.00165>
- Levine, N. (2012). *Marx's discourse with Hegel. Marx's Discourse with Hegel*. <https://doi.org/10.1057/9780230360426>
- Lubenow, J. A. (2012). Public Sphere and Deliberative Democracy in Jürgen Habermas: Theoretical Model and Critical Discourses. *American Journal of Sociological Research*, 2(4), 58-71. <https://doi.org/10.5923/j.sociology.20120204.02>
- Naod, J., & Ritzer, G. (2001). Modern Sociological Theory. *Teaching Sociology*. <https://doi.org/10.2307/1318728>
- Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory. Sociological Theory*. Retrieved from <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Sociological+Theory#5>
- Schutte, A. S. (2009). Government Policies and Civil Society Initiatives Against Corruption. In M. Bunte, & A. Ufen, *Democratization in Post-Suharto*

Indonesia. Abingdon: Routledge.
Strøby Jensen, C. (2013). Neo-
functionalism. In *European Union
Politics* (pp. 59–70).

- Bates, T. R. (1975). Gramsci and the Theory of Hegemony. *Journal of the History of Ideas*, 36(2), 351. <https://doi.org/10.2307/2708933>
- Bedirhanoglu, P. (2007). The Neoliberal Discourse on Corruption as a Means of Consent Building: Reflections from Post-Crisis Turkey. *Third World Quarterly*, 28 (7), 1239-1254.
- Garnham, N. (2007). Habermas and the public sphere. *Global Media and Communication*, 3(2), 201-214. <https://doi.org/10.1177/1742766507078417>
- Gephart, M. (2015). Contested meaning in the anti-corruption Discourse: International and Local Narrative in the Case of Paraguay. *Critical Policy Studies*, 9 (2), 119-138.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Contributions To a Discourse Theory of Law and Democracy. <https://doi.org/10.2307/2941077>
- Hadiz, V. (2006). Corruption and Neoliberal Reform: Market and Predatory Power in Indonesia and Southeast Asia. In R. Robinson, *The Neo-Liberal Revolution: Forging the Market State*. New York: Palgrave Macmillan.
- Heidenheimer, A., & Johnston, M. (2002). *Political Theory: Concepts and Contexts*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Holmwood, J. (2005). Functionalism and its critics. *Modern Social Theory: An Introduction*, II, 1-8. Retrieved from <http://www.eolss.net/Eolss-sampleAllChapter.aspx>
- Huntington. (2002). Modernization and Corruption. In A. Heidenheimer, & M. Johnston, *Political Corruption: Concepts and Contexts*. Ne Jersey: Transaction Publisher.
- Juwono, V. (2016). *Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and Anti-Corruption Initiatives in Indonesia 1945-2014*. London School of Economy and Political Science.
- Kellner, D. (2002). Theorizing Globalization. *Sociological Theory*, 20(3), 285-305. <https://doi.org/10.1111/0735-2751.00165>
- Levine, N. (2012). *Marx's discourse with Hegel. Marx's Discourse with Hegel*. <https://doi.org/10.1057/9780230360426>
- Lubenow, J. A. (2012). Public Sphere and Deliberative Democracy in Jürgen Habermas: Theoretical Model and Critical Discourses. *American Journal of Sociological Research*, 2(4), 58-71. <https://doi.org/10.5923/j.sociology.20120204.02>
- Naod, J., & Ritzer, G. (2001). Modern Sociological Theory. *Teaching Sociology*. <https://doi.org/10.2307/1318728>
- Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory. Sociological Theory*. Retrieved from <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Sociological+Theory#5>
- Schutte, A. S. (2009). Government Policies and Civil Society Initiatives Against Corruption. In M. Bunte, & A. Ufen, *Democratization in Post-Suharto*

Indonesia. Abingdon: Routledge.
Strøby Jensen, C. (2013). Neo-
functionalism. In *European Union
Politics* (pp. 59–70).